JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(2), Juli 2021, 795-803
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v21i2.1566

Rasionalitas dan Moralitas dalam Pembelajaran Ekonomi

Mayasari*
Universitas Batanghari Jambi
*Correspondence email: mhmayahendra@gmail.com

Abstrak. Perilaku ekonomi (*economic behavior*) adalah tindakan-tindakan (*actions*) atau reaksi-reaksi (*reactions*) dari suatu objek yang berupa baik rasionalitas, moralitas, gaya hidup, efisiensi dalam aktivitas konsumtif, dan efektivitas dalam aktivitas produktif. Dalam penulisan ini tindakan-tindakan yang akan dibahas, dianalisis, dan dikaji adalah tindakan tentang rasionalitas dan moralitas dalam pembelajaran ekonomi. Pada hakekatnya rasionalitas dalam pembelajaran ekonomi membelajarkan pelajar untuk bertindak rasional dalam melakukan tindakan ekonomi. Akibat dari tindakan rasionalitas ini membentuk pelajar menjadi materialis, memiliki nilai ekonomis, dan memaksimalkan keuntungan dari berfikir rasional. Namun tidak semua pembelajaran ekonomi dirasionalitaskan karena dalam pembelajaran ekonomi terdapat moralitas ekonomi yang dapat mendidik pelajar lebih bermoral menjadi *economicus man* (manusia ekonomi). Moralitas berkaitan dengan tindakan seseorang dalam hubungan sosial, yang menekankan pada kepedulian seseorang terhadap keberadan orang lain.

Kata kunci: Rasionalitas; Moralitas; Pembelajaran Ekonomi

Abstract. *Economic behavior is the actions or reactions of an object in the form of both rationality, morality, lifestyle, efficiency in consumptive activities, and effectiveness in productive activities. In this paper, the actions to be discussed, analyzed, and studied are actions about rationality and morality in economic learning. In essence, rationality in economic learning teaches students to act rationally in taking economic action. The result of this act of rationality forms students to become materialists, to have economic value, and to maximize the benefits of rational thinking. However, not all economic learning is rationalized because in economic learning there is economic morality that can educate students to be more moral to become economicus man (economic man). Morality relates to one's actions in social relationships, which emphasizes one's concern for the existence of others.*

Keywords: *Rationality; Morality; Economic Learning*

PENDAHULUAN

Sistem perekonomian suatu Negara berkaitan erat dengan falsafah dan idiologi negaranya. Negara Indonesia beridiologikan pancasila, hendaknya perekonomian dijalankan berdasasarkan pancasialis yang lebih sering disebut dengan system ekonomi pancasila, dimana system ini menuju pada perekonomian berkerakyatan yang sesuai dengan UUD 1945, namun sampai saat ini perkembanganya masih terus berkembang dalam wacana diskusi untuk kearah itu, system ini masih dalam angan-angan bangsa Indonesia dan belum menemukan formula yang ideal untuk kehidupan perekonomian suatu bangsa yang akan meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menilik perkembangannya perekonomian Indonesia dari berbagai rezim pemerintahan mulai dari rezim orde lama hingga saat ini, belumlah sesuai dengan apa yang telah digaungkan oleh bapak proklamator Bung Hatta melalui UUD 1945 pasal 33 sebagai cita-cita bangsa yang akan memiliki system perekonomian berkerakyatan. Hal ini terlihat dari gejolak ekonomi yang semakin menyengsarakan rakyat Indonesia selama berganti-ganti rezim kekuasaan pemerintahan. Harus kita sadari bahwa perekonomian kita sudah salah kaprah dari apa yang seharusnya kita kerjakan demi perbaikan perekonomian. Banyak idiologi-idiologi asing dengan mudah merengkuh system perekonomian di Indonesia seperti system liberalism dan sosialisme. Sehingga dalam pelaksanaan untuk mengatur perekonomian, Negara Indonesia menganut faham system ekonomi campuran dimana ada liberalism dan sosialisme.

Idiologi liberalism tersebut berkembang salah satunya dapat dilihat dari pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki modal hanya melakukan kegiatan perekonomian untuk kepentingan individual dan kelompok pemilik modal saja atas sumber daya ekonomi yang ada tanpa memperhatikan kesejahteraan masyrakatnya. Menurut idiologi ini prinsip “keadilan” yang digaungkan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang. Sedangkan idiologi sosialisme, dimana campur tangan pemerintah sangat dominan untuk mengelola sumber daya ekonomi sebagi milik Negara dan akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat dengan prinsip “keadilan” yang digaungkan adalah setiap orang menerima imbalan yang sama. Kedua prinsip keadilan yang digaungkan oleh kedua idiologi tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang digaungkan oleh idiologi pancasila dalam perkembanganya terdapat demokrasi ekonomi yakni prinsip “keadilan yang efesien” artinya keadilan yang tepat sasaran bagi masyarakat.

Dominasi pemilik modal swasta, dan ketidakmampuan pemerintah dalam menentukan

kebijakan perekonomian dalam mengelola perekonomian Indonesia membuat perekonomian berada dalam gejolak berkepanjangan sehingga membuat para pemilik modal bergerak dengan leluasa untuk kepentinganya mengeruk seluruh sumber daya yang ada, sehingga makin memperparah kondisi perekonomian, walaupun secara makro pertumbuhan ekonomi berada dalam keadaan baik, tapi masih terjadi tumpang tindih dikalangan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum merasa makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, system ekonomi Indonesia harus kembali pada UUD 1945 pasal 33 yakni system demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, sebagai *global guidelines* (petunjuk global) perekonomian nasional, dimana prinsip-prinsip demokrasi yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai berikut: 1) Kebersamaan, 2) Efisiensi berkeadilan; 3) Berkelanjutan; 4) Berwawasan lingkungan; 5) Kemandirian; dan 6) Keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional

Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut belumlah terlaksana sebagai pondasi untuk membangun perekonomian suatu Negara, karena prinsip-prinsip tersebut diabaikan dan tak pernah diajarkan pada anak-anak penerus bangsa dalam pendidikannya. Salah satu cara membangun perekonomian suatu Negara melalui dunia pendidikan. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia sungguh sangatlah memprihatinkan, kenapa memprihatinkan? Tentu kita tau jawabanya, kita bisa melihatnya secara kasat mata dimana output yang di hasilkan oleh dunia pendidikan saat ini kurang menghargai adanya perbedaan cara pandang, toleransi, saling menghormati, dan bersikap sesuai dengan nilai konstitusi Negara Indonesia yakni nilai-nilai pancasila. Ini adalah fenomena yang ironis, dimana dunia pendidikan kita mengajarkan peserta didik tentang demokrasi ekonomi dengan idiologi liberalism-sosialis (yang akan membentuk karakter pelajar materialis dan rasionalitas) sedangkan dasar dan idiologi ekonomi pancasila (yang akan membentuk karakter pelajar humanis dan moralitas) sebagai jati diri bangsa diabaikan. Oleh karena itu perlu pembenahan dalam kurikulum pembelajaran pada pendidikan Negara kita ini.

Perlu kita ketahui bahwa pembelajaran ekonomi yang telah berlangsung sekian lama di Indonesia terjadi kekeliruan dalam sudut pandang dan perspektif dari para pendidik di Universitas bahkan sekolah, mereka hanya mengajarkan separo saja dari ajaran ekonomi klasik Adam Smith. Konsep yang diungkapkan oleh Adam Smith tentang manusia social (*homosocius*) pada tahun 1759 tidak pernah diajarkan bahkan samapai melupakan ajaran tersebut. Sedangkan ungkapan Adam Smith yang menyatakan bahwa manusia ekonomi (*homoeconomicus)* diajarkan dengan cara mengglobal samapai beberapa sebagian besar negara-negara yang ada di dunia ini menggunakan konsep tersebut, padahal ajaran *homoeconomicus* bersifat egois dan mementingan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain.

> *Man it has been said, has a natural love for society, and desires that the union of mankind should be preserved for its own sake, and though the himself was to derive no benefit from it. (Smith, 1759).*

Bukan hanya kesalahan di atas saja para pendidik mengajarkan ekonomi secara menyeluruh tentang konsep metode analisis deduktif seperti teori ekonomi neoklasik dari Alfred Marshal dan Gustave Schmoller. Padahal mazhab neoklasik ini menekankan untuk menjalankan roda perekonomian seharusnya memakai dua metode secara bersamaan yakni metode deduktif dan induktif. Ajaran mazhab ini yang sesungguhnya dan seharusnya mengingatkan peristiwa pergulatan metode (*metodensreit)* pakar-pakar ekonom tahun 1873 – 1874 dalam menggunakan model-model matematika yang kebablasan dan sekaligus mengabaikan data-data sejarah yang relevan. Memang mempelajari ekonomi dengan matematika lebih cepat dan efisien tetapi belum tentu data yang diperoleh dari perhitungan matematika relevan dengan fakta yang terjadi. Sedangkan secara induktif lebih memakan waktu lama, dan tenaga yang banyak sehingga dalam kurun waktu yang terdesak menggunkan pendekatan metode deduktif untuk mempelajari ekonomi.

Salah satu kelemahan dari ilmu ekonomi neoklasik yang sangat transparan adalah tidak adanya unsur budaya dan masalah keadilan sebagai factor yang dianalisis dalam modelnya. Ini sangat dilemma, mengingat idiologi yang kita miliki adalah idiologi pancasila dimana bertujuan untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia tidak tersentuh dalam mempelajari ekonomi. Seharusnya factor keadilan ekonomi dan keadilan social dipelajari dalam ekonomi untuk membangun perekonomian yang dapat mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat seperti apa yang menjadi tujuan pancasila dan pasal 33 UUD 1945.

Tulisan ini akan mengungkapkan tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam pembelajaran ekonomi kita saat ini yang hanya berorientasi pada angka rasionalitas dan materialis yang diajarkan oleh idiologi asing (liberal dan sosialis) bukan pada pemahaman dalam pembelajaran ekonomi dengan memasukan unsure moralitas yang berasal dari idiologi bangsa sendiri (idiologi pancasila), sehingga pembelajaran ekonomi dapat membentuk peserta didik menjadi lebih cermat, menghargai perbedaan, kreatif, mandiri dan memiliki nilai-nilai pancasila.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, menurut Bogdan dan Biklen (1982) *"Qualitative research is often called*

naturalistic because researchers are interested in investigating events as they occur naturally." Pendekatan kualitatif ini dipilih dengan alasan berikut: (1) realitas yang ada pada dasarnya bersifat ganda, terkonstruksi dan holistik; (2) antara orang yang mengetahui *(knower)* dan apa yang diketahui *(known)* bersifat interaktif dan tak terpisahkan; (3) hanya waktu dan konteks yang memungkinkan berkaitan dengan hipotesis kerja; (4) semua entitas yang ada dalam kondisi saling simultan sehingga hampir-hampir tidak mungkin membedakan antara sebab dengan akibat; dan (5) penelitian pada dasarnya tidak bebas nilai (Guba dan Lincoln, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran Ekonomi

Pembelajaran adalah merupakan suatu kombinasi yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan (Hamalik, 2008). Menurut Uno (2009) pembelajaran adalah suatu kegiatan yang berupaya membelajarkan pelajar secara terintegrasi dengan memperhitungkan faktor lingkungan belajar, karakteristik pelajar, karakteristik bidang studi, serta berbagai strategi pembelajaran, baik penyampaian, pengelolaan, maupun pengorganisasian pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran sering diidentikan dengan pengajaran, dimana guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. Berdasarkan hal tersebut pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri pelajar.

Pembelajaran ekonomi ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Dimana ekonomi itu sendiri merupakan cabang ilmu dari ilmu social yang mempelajari tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi, dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Menurut Smith (1759) secara sistematis ilmu ekonomi mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Ini yang banyak dikenal sebagai teori ekonomi klasik. Dalam analisisnya, Adam Smith banyak menggunakan istilah-istilah normatif seperti: nilai *(value)*, kekayaan *(welfare)*, dan utilitas *(utility)* berdasarkan asumsi berlakunya hukum alami.

Seiring dengan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan muncullah ilmu yang disebut ilmu ekonomi. Menurut Samuelson (Sukwiaty et al, 2009) mengemukakan bahwa:

> *"Ilmu ekonomi sebagai suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditas, untuk kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat."*

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran ekonomi adalah bagian dari mata pelajaran di sekolah yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya. Menurut Permen 22 Tahun 2006 Standar Isi/Standar Kompetensi Dasar SMsekolah menengah, mata pelajaran ekonomi bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memenuhi sejumlah konsep ekonomi yang berkaitan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari. Terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat dan negara.
2. Menampilkan sikap ingin tahu dan terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi.
3. Membentuk sikap bijak, rasional, dan bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat dan negara.
4. Membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai social ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Paparan di atas, memberikan kita suatu pencerahan bahwa suatu ilmu atau cabang ilmu yang baik jika dipelajari dengan benar akan memberikan manfaat besar bagi yang mempelajarinya secara sungguh-sungguh. Disamping perlu relevan suatu ilmu juga harus realistis, artinya harus melihat situasi dan kondisi masyarakat. Sebagai calon warga masyarakat semua pelajar sekolah menengah harus mengerti tentang peristiwa dan masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari terutama yang mempunyai dampak ekonomi masyarakat di lingkungannya secara langsung. Namun pembelajaran ekonomi yang diajarkan selama ini di Indonesia baik pada tingkatan pendidikan tinggi bahkan samapai ke sekolah menegah, terlihat tidak relevan sekaligus tidak realistis, karena yang dianggap penting rupanya bukan memberikan pemahaman kepada pelajar tentang kenyataan ekonomi tetapi sekedar membekali pelajar berbagai pengetahuan, keterampilan dan sikap ekonomi yang perlu untuk mendalami lebih lanjut ilmu ekonomi di perguruan tinggi. Pelajar diajarkan sesuatu yang semu dan abstraksi manusia dan sosok bangunan

ilmu dan konsep-konsep yang abstrak tentang teori-teori ekonomi mikro dan makro seperti halnya ilmu ekonomi neoklasik versi amerika yang tentunya sangatlah berbeda kondisi dan lingkungan masyarakat yang ada di Indonesia.

Rasionalitas dan Moralitas dalam Pembelajaran Ekonomi

Perilaku ekonomi (*economic behavior*) adalah tindakan-tindakan (*actions*) atau reaksi-reaksi (*reactions*) dari suatu objek yang berupa baik rasionalitas, moralitas, gaya hidup, efisiensi dalam aktivitas konsumtif, dan efektivitas dalam aktivitas produktif. Dalam penulisan ini tindakan-tindakan yang akan dibahas, dianalisis, dan dikaji adalah tindakan tentang rasionalitas dan moralitas dalam pembelajaran ekonomi.

Rasionalitas dalam Ekonomi

Pada bagian ini penulis ingin memaparkan hasil temuan berdasarkan sumber buku bacaan tentang rasionalitas ekonomi dalam system kapitalis dan sosialis. Perlu kita pahami tentang konsep rasionalitas dalam ekonomi, tentunya tidak bisa lepas dari pemahaman ilmu ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi didefinisikan secara beragam, paling populer Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan (*opportunity cost*).

Definisi tersebut dianggap masih kurang representatif sehingga para ahli ekonomi neo-klasik, seperti Lionel Robbins, mengajukan pengertian lain bahwa inti kegiatan ekonomi adalah aspek "pilihan dalam penggunaan sumberdaya." Dalam pemilihan ini, lanjutnya, manusia menjumpai masalah kelangkaan (*scarcity*). Dengan demikian, sasaran ilmu ekonomi adalah bagaimana mengatasi kelangkaan itu. Dari situ muncul definisi ilmu ekonomi yang dipegang hingga kini, yaitu "sebuah kajian tentang prilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan alat-alat pemuas yang terbatas, yang mengundang pilihan dalam penggunaannya".

Dalam terminologi di atas, konsep rasionalitas ekonomi itu akan terlihat. Setiap orang yang ingin mencari kesejahteraan hidupnya (kekayaan material) dengan cara melakukan pilihan-pilihan yang tepat bagi dirinya sendiri, dengan menerapkan suatu prinsip bahwa dirinya jangan sampai tidak kebagian untuk mendapatkan pilihan itu karena ketersediaan yang terbatas, oleh karena itu orang tersebut telah melakukan tindakan rasional. Jika kita analogikan dalam pelaku ekonomi khususnya seorang produsen akan dianggap rasional jika produsen tersebut mencapai apa yang menjadi tujuan usahanya yakni mencapai keuntungan dengan berbagai cara misalnya produsen tersebut melakukan beberapa strategi, meminimalisasi kapital dan mendapatkan keuntungan maksimum. Demikian juga pelaku ekonomi seorang konsumen, ia dianggap rasional, jika ia dapat memenuhi atau melampaui batas maksimum kepuasannya dari alat-alat pemuas yang terbatas. Oleh karena itu, rasionalitas ekonomi dapat dipahami sebagai tindakan atas dasar kepentingan pribadi (*self-interest*) untuk mencapai kepuasannya yang bersifat material lantaran khawatir tidak mendapatkan kepuasan itu karena terbatasnya alat atau sumber pemuas.

Kepentingan pribadi atau *self-interest*, menjadi titik tekan di sini. Namun, menurut Adam Smith, penekanan pada *self-interest* itu bukan berarti mengabaikan kepentingan masyarakat. Menurutnya, dengan memaksimalkan *self-interest*, kepentingan (kesejahteraan) masyarakat dengan sendirinya akan terpenuhi kesejahteraan masyarakat itu. Oleh karena itu, dalam buku-buku pembelajaran ekonomi, rasionalitas ini dijelaskan bahwa pelaku ekonomi melakukan tindakan rasional jika ia melakukan sesuatu yang sesuai dengan *self-interest*, dan pada saat yang sama konsisten dengan membuat pilihan-pilihannya dengan tujuan dapat dikuantifikasikan (dihitung untung ruginya) menuju kesejahteraan umum. (Agil, 1992). Meskipun ada tujuan kepentingan umumnya, tetapi itu berangkat dari kepentingan pribadi. Rasionalitas ekonomi dalam penulisan ini dikaji dari sudut pandang dan perspektif dari system ekonomi kapitalis dan sosialis.

Rasionalitas Sistem Kapitalis

Sistem kapitalis telah mengungkapkan dengan tegas bahwa semua sumber daya merupakan milik pribadi. Pelaku ekonomi pertama sebagai contoh di sini adalah perusahaan dijalankan oleh pengusaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Pelaku ekonomi kedua sebagai contoh rumah tangga berusaha untuk berusaha memperoleh pendapatan sebanyak banyaknya. Tak ada perusahaan dan rumah tangga yang cukup besar di pasar untuk mempengaruhi harga barang yang dijual dan dibeli, dengan kata lain dalam system ini terdapat persaingan sempurna. Pada pihak pemerintah hak milik dilindungi perjanjian, dan suatu pajak yang rendah dipungut. Perusahaan mempunyai kebebasan usaha dan rumah tangga punya kemerdekaan untuk memilih. Sehingga harga bergerak dengan bebas, mekanisme pasar mengkordinir produksi dan membagikan pendapatan. Buruh tidak terorganisir dan factor produksi lain menerima balas jasa yang diberikan oleh pasar kepada mereka (Grossman, 1995).

Ada beberapa indikator yang menjadi kelemahan system ekonomi kapitalis yaitu (Grossman, 1995):

1. **Tidak merata**. Persaingan bebas menimbulkan kecenderungan setiap orang untuk lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Bagi orang yang telah berkecukupan dalam bidang ekonomi

tidak banyak peduli dengan orang yang kurang mampu, karena kepedulian bukan bagian dari kewajibannya. Maka ketimpangan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang individualis. Ketimpangan sosial secara tidak langsung mengubah struktur masyarakat menjadi dua bagian kaya-dan miskin, kadang dengan posisi ini meraka gunakan sebagai ligitimasi untuk menuntut lebih banyak kepada pemerintah. Yang kaya merasa tidak diberi fasilitas lebih karena ia ikut membantu pembangunan negara, demikian juga yang miskin merasa bahwa ia berhak dipelihara negara, karena ia miskin akibat sistem ekonomi yang dipakai pemerintah.

2. **Tidak selaras.** Setiap orang menggunakan kebebasan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimilikinya dengan efisien guna memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Keadaan ini yang menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya dengan alasan segala apapun yang dikerjakan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan kebebasan yang dimilikinya. Padahal kebebasan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, dimana manusia satu dengan yang lain juga berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan eksploitatitf. Bila prioritas untuk memproduksi barang sosial yang diinginkan tidak dapat diekspresikan dalam mekanisme pasar, maka kekuatan-kekuatan pasar akan cenderung mendorong keadaan kepada penggunaan sumber-sumber daya yang tidak efisien dan tidak merata. Maka tidak akan ada keselarasan dalam kehidupan masyarakat bila menggunakan sistem ini.
3. **Maksimasi profit**. Efisiensi usaha bisa dijadikan legitimasi untuk menaikkan batas produksi dan mengurangi biayanya guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini dilakukan sebagai alasan bagi pengusaha untuk mempertahankan produksi dan memenangkan persaingan usaha dengan pihak lain. Kadang kala kuatnya pengaruh orientasi ini menjadikan pengusaha kurang mempertimbangkan kesejahteraan tenaga kerja bagian dalam terselenggaranya produksi. Konsep kerja kapitalis telah menjadikan sebagai syarat terjadi efisiensi telah membangun struktur kependudukan yang diskriminatif. Kompensasi bagi tenaga kerja profesional yang besar sementara yang tidak profesional hanya sedikit bahkan di bawah kebutuhan outonomous telah menjadikan ketegangan sosial. Ketegangan ini terfokus pada perdebatan atas makna pemerataan.
4. **Krisis Moral**. Dalam kapitalisme setiap orang berusaha mengejar kekayaan supaya mendapatkan peran lebih di dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan perencanaan/penjadwalan dalam mendapatkan kekayaan mendominasi hidup manusia dari hari ke hari. Keadaan ini mempersempit ruang bagi manusia untuk berintekrasi dengan masyarakat sekitarnya. Akhirnya hal ini mengakibatkan manusia kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya (*dehumanisasi*) dan terasing oleh dirinya sendiri (aliensi). Kapitalisme telah menjerumuskan manusia pada sikap yang mempermaklumkan keadaan, segala sesuatu yang terjadi dianggap sebagai fenomena kehidupan yang tidak terelakkan. Demikian juga dengan masalah nilai bagi masyarakat kapitalis tidak diserahkan pada pemahaman salah satu nilai, tetapi masyarakat diberi berbagai alternatif pilihan untuk memilih nilai yang dianggapnya paling baik bagi mereka.
5. **Materialistis.** Nilai-nilai sosial seperti kerjasama, saling membantu, dan lain sebagainya, kurang mendapat tempat dalam kehidupan kapitalis. Dalam sistem kapitalis segala kegiatan ekonomi didasarkan atas terpenuhinya optimalisasi produksi guna mencapai output produksi dan keuntungan produksi yang diharapkan. Keadaan ini menjadikan hidup masyarakat hanya untuk memenuhi aspek-aspek produksi saja, sehingga menimbulkan dorongan bagi manusia untuk selalu berhitung. Hal ini yang menjadikan perilaku transaksional di dalam kehidupan masyarakat.
6. **Mengesampingkan Kesejahteraan.** Konsep kapitalis cenderung memahami pertumbuhan ekonomi lebih harus diperhatikan daripada pemerataan ekonomi, karena pemerataan akan timbul setelah adanya pertumbuhan ekonomi (*tricle down effect*). Kebijakan ini merupakan dampak dari mekanisme modal yang cenderung berputar pada kalangan penguasaha. Bila pengusaha mendapatkan keuntungan maka secara tidak langsung akan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini menjadikan kesejahteraan masyrakat terabaikan.

Menurut Chapra (2000) menjelaskan bahwa kapitalis akan menjurus kepada; kebebasan individu yang tidak terbatasi untuk memenuhi kepentingan pribadi, kepemilikan, dan pengelolaan privat; ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi maksimum serta pemenuhan kebutuhan menurut preferensi individual; dan lebih mengutamakan kekuatan-kekuatan pasar dalam lokasi dan distribusi sumber-sumber daya dan meminimalkan peran pemerintah atau penilaian kolektif.

Rasionalitas Sistem Sosialis

Sistem ini tidak memberikan kebebasan pada individu untuk mengelola sumber daya ekonomi atau faktor produksi, melainkan sumberdaya ekonomi atau factor produksi dimiliki dan dikuasai oleh Negara. Dalam perkembanganya aliran ini menjadi system ekonomi sosialis atau komando. Dimana aliran ini menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian demi

kemakmuran rakyat dan semua alat produksi adalah milik Negara dan didistribusikan untuk kepentingan bersama. Perekonomian dijalankan dan dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Prinsip yang dipegang adalah prinsip 'keadilan' dimana setiap orang memiliki imbalan yang sama.

Ada beberapa indikator yang menjadi kelemahan system ekonomi Sosialis menurut Chapra (2000) yaitu:

1. **Pemilikan harta oleh Negara.** Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara dan diatur kemudian lewat negara, dipergunakan untuk seluruh rakyat. Rakyat tidak mempunyai hak untuk memiliki harta kecuali harta-harta tertentu yang telah ditetapkan oleh negara. Motivasi masyarakat untuk bekerja tidak didasarkan atas nilai kepemilikan yang ia akan dapatkan kelak setelah bekerja tetapi lebih dikarenakan adanya aturan yang ketat atas apa yang harus mereka kerjakan. Tetapi, bukan berarti rakyat tidak mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Rakyat mendapatkan hasilnya melalui pembagian yang rata yang dilakukan negara. Perhatian negara pada bidang-bidang tertentu, menimbulkan kecenderungan lebih banyak mengalokasikan hasil produksi pada sektor yang diprioritaskan, misalnya ketika masa perang negara sosialisasi lebih cenderung memperhatikan bagaimana sektor ekonomi dialihkan untuk mengakomodir kebutuhan perang dibanding masalah kesejahteraan rakyat. Akibatnya, kapasitas kerja rakyat dikondisikan pada target produksi negara yang sedang perang. Dorongan masyarakat untuk bekerja sebagai hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dengan demikian individu secara langsung tidak mempunyai hak atas kepemilikannya.
2. **Kesamaan Ekonomi.** Sistem ekonomi sosialis menyatakan walaupun sulit ditemui di semua negara komunis bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Prinsip ini didasarkan atas kebutuhan minimal perorang dalam hidup perharinya. Kesamaan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya didasarkan atas asumsi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan. Sehingga potensi yang berkembang dikarenakan latar belakang kemampuan alami kurang mendapat perhatian oleh negara. Keadaan ini menjerumuskan pada kehidupan masyarakat yang beku dan tidak ada dinamika, karena apresiasi hidup manusia terbelenggu oleh berbagai aturan negara yang lebih dipengaruhi oleh perspektif baku tentang masalah kemasyarakatan. Bentuk negara dalam mendinamisasikan masyarakatpun ada, tetapi dengan cara mengkonsentrasikan rakyat pada bidangnya secara penuh, misalnya dalam bidang pendidikan dan olahraga.
3. **Disiplin Politik.** Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan Negara diletakkan di bawah peraturan kaun buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta dihapus. Aturan yang dipergunakan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme. Hal ini juga mengatur kehidupan rakyat. Maka keberlangsungan system sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Marx, Lenin dan Stalin. Praktek sosialisme seperti ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya sosialisme tidak memenuhi karakter sistem yang mampu meningkatkan peran rakyat dalam berpartisipasi terhadap negara. Nasionalisme kalau dibentuk dalam disiplin politik yang ketat tidak akan menimbulkan nasionalisasi, malah cenderung akan timbul sikap antipati terhadap sistem yang ada. Misalnya, tragedi di lapangan merah Tianamen Cina merupakan aktualiasasi kebebasan untuk berbicara sebagai rakyat Cina terhadap pemerintah yang menggunakan aturan yang ketat terhadap rakyat.

Pada hakekatnya rasionalitas dalam pembelajaran ekonomi membelajarkan pelajar untuk bertindak rasional dalam melakukan tindakan ekonomi. Mempelajari ilmu ekonomi itu adalah sesuatu yang kompleksitas agar pelajar dapat menentukan pilihan-pilihan yang tepat dengan keterbatasan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang vital terlebih dahulu baru kemudian dapat memenuhi kebutuhan yang lain karena pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan yang sangat tak terbatas, maka diperlukanlah rasionalitas untuk *self interest* (kepentingan pribadi) sehingga dapat terpenuhi. Kelemahan dari rasionalitas ini membentuk pelajar menjadi materialis. Namun tidak semua pembelajaran ekonomi dirasionalitaskan karena dalam pembelajaran ekonomi terdapat moralitas ekonomi yang dapat mendidik pelajar lebih bermoral menjadi *economicus man* (manusia ekonomi).

Disadari atau tidak rasionalitas ekonomi bagian dari tuntutan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam menghadapi persoalan pokok dalam ekonomi yaitu kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia terbatas. Hal inilah yang mengakibatkan manusia harus berperilaku rasional dalam melakukan aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi bahkan konsumsi untuk waktu jangka pendek ataupun panjang dapat diatasi sehingga dapat terjamin kesejahteraannya. Sebagaimana yang diungkapkan Putranto (2006) yang mengungkapkan bahwa rasionalitas itu adalah kemampuan seseorang untuk berfikir baik serta berlatih dalam mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2011) *Rational is to make consistent choices and maximize value within certain limits.* Karena, dalam menjalankan aktivitas ekonomi tentunya terdapat banyak

kendala, untuk menghadapi kendala tersebut dibutuhkan akal pikiran yang sehat dan baik sehingga dapat membedakan priotitas kebutuhan yang harus didahulukan dan kebutuhan yang harus ditunda.

Tumbuhnya perilaku rasionalitas seseorang bukan datang dari sendirinya melainkan dari proses pembelajaran dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Pembelajaran bisa diperoleh dari lingkungan keluarga, lingkungan belajar (sekolah), teman sebaya dan lingkungan masyarakat. Akibat dari proses pembelajaran tentang rasionalitas ekonomi dapat menjadikan pelajar bersifat matrelialistis, memiliki nilai ekonomis, dan memaksimalkan keuntungan dari berfikir rasional.

Moralitas dalam Ekonomi

Menurut Eckensberger (dalam Wahyono, 2001) mengungkapkan bahwa konsep moralitas adalah sebagai berikut:

> *"Morality refers to what consider "naturally" or intrinsically good or bad. Moral serve to coordinate interest of people, but also to re-fer to human rights and obligations in partikular. They consist of standards of justice,of general welfare and of the avoidance of harm. Examples are personal honesty, responsibility, and readiness to act when someone is in need of help."*

Uraian di atas dapat diartikan bahwa moralitas berkaitan dengan tindakan seseorang dalam hubungan sosial, yang menekankan pada kepedulian seseorang terhadap keberadan orang lain. Sebagai contoh seseorang yang memiliki sikap moral adalah seseorang yang penyayang, peka terhadap situasi dan kondisi lingkungan dan selalu menolong orang lain yang membutuhkan bantuan.

Konsep moral itu sendiri sudah kita ketahui pada uraian tersebut, dalam penulisan ini akan deibahas tentang moralitas dalam ekonomi. Moralitas ekonomi adalah bagian dari perilaku ekonomi yang berkaitan dengan sikap dan tindakan ekonomi seseorang dalam interaksinya dengan orang lain atau kelompok orang, yang menekankan pada kepedulian seseorang terhadap ke-beradan orang lain. Berbicara moralitas dalam perilaku ekonomi melibatkan paradigm yang cenderung berlawanan. Moralitas berbicara tentang kepedulian terhadap orang lain, sementara paradigma perilaku ekonomi yang berterima umum yang dilandasi rasionalitas lebih menekankan bagaimana memenuhi laba yang diharapkan.

Pencapaian kepuasan yang berupa laba seringkali mengabaikan kepenti-ngan orang lain, dengan kata lain selama tidak bertentangan dengan hukum, apa saja boleh dilakukan untuk mengumpulkan pundi-pundi laba yang dikehendaki. Sayangnya hukum di Indonesia belum mengatur secara mendalam dimensi mora-litas ekonomi secara rasional.

Mendalami moralitas ekonomi pancasila akan melahirkan jawaban dari persoalan di atas, meskipun latar belakang yang berbeda akan melahirkan persepsi yang berbeda pula. Latar belakang dimaksud adalah anutan teori klasik-neokalsik/ liberal-neoliberal/kapitalis, teori sosialis maupun syariah. Terkait dengan persoalan paradigma di atas, Etzioni (1992) menawarkan paradigma yang dikenal dengan "aku dan kita" atau "komuni-tas responsif" sebagaimana ungkapannya sebagai berikut:

> *"Istilah komunitas responsif digunakan untuk memberikan kedudu-kan penuh, baik bagi individu maupun kolektivitas bersama. Ko-munitas yang responsif lebih bersifat mengintegrasikan dibanding agregasi individu pada individualisme yang bersifat sementara, ka-rena agregasi terbentuk dari jalinan kepentingan masing-masing in-dividu untuk memaksimumkan diri, dan kurang hierarkis dan ter-struktur dibadingkan komunitas yang otoriter. ..... Baik individu maupun komunitas sepenuhnya esensial, dan karenanya memiliki kedudukan yang sama. ..... individu dan komunitas saling mem-bentuk dan saling membutuhkan."*

Pandangan Etzioni di atas, jika kita pahami secara mendalam pada prinsipnya terdapat kesamaan dengan konsep moralitas ekonomi pancasila yang ditawarkan para pendiri bangsa, yang akan di bahas melalui moralitas ekonomi pancasila dan akan dituangkan dalam moralitas ekonomi sebagai hasil belajar.

Moralitas Ekonomi Pancasila

Sudarmanto (2010) mengatakan bahwa Ekonomi Pancasila sebagai ilmu ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila mengandung 5 asas yang mana semua substansi sila Pancasila yaitu (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Disinilah kelima sila di atas menjadi substansi etika dalam Ekonomi Pancasila. Kalau sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan rangsangan moral maka sila 2 sampai 5 menjadi landasan rangsangan sosial ekonomika etik Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila dengan kata lain merangkum secara tepat dua elemen utama pencapaian kesejahteraan ekonomi.

Penekanan pendapat di atas adalah pada Ekonomi Pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan (*institutional economics*). Hal ini menarik, mengingat bahwa Sistem Ekonomi Pancasila bukan sistem ekonomi kapitalis/liberal, tetapi juga bukan merupakan sistem ekonomi sosialis, yang memiliki arti bahwa Sistem Ekonomi Pancasila tidak berada pada kedua blok sistem ekonomi besar dunia tersebut. Lebih lanjut jika dikaji secara teoritis, bahwa Sistem Ekonomi Pancasila sejalan

dengan New Institutional Economics (NIE), terutama generasi kedua.

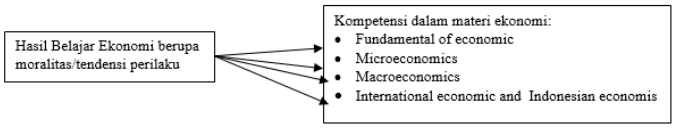
Selanjutnya konsep ekonomika etik ekonomi Pancasila, yang dikemukakan oleh Mubyarto (dalam Sudarmanto, 2010) dalam bukunya *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila* dicirikan sebagai berikut:

> *"(1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial. (2) Ada kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan kemerataan sosial ekonomi. (3) Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. (4) Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. (5) Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga efisiensi dan pertumbuhan ekonomi."*

Ekonomi Pancasila menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat, sehinggga konsep efisiensi harus berbanding dengan konsep keadilan sosial. Karena konsep keadilan sosial berbicara pemerataan sementara efisiensi berbicara pertumbuhan.

Moralitas Ekonomi sebagai Hasil Belajar

Menurut Haryono (2008) Moralitas sebagai hasil belajar dapat terlihat se-perti gambar berikut:



Gambar 1. Moralitas Ekonomi sebagai Hasil Belajar (Sumber: Haryono, 2008)

Sebagai hasil belajar, moralitas ekonomi setidaknya dapat dipelajari dari materi-materi yang terdapat dalam dasar-dasar ekonomi, ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi internasional dan ekonomi Indonesia. Di Indonesia pembelajaran materi-materi di atas telah dimulai sejak sekolah dasar, meskipun baru merupakan pengantar atau dasar-dasar. Kajian mendalam terhadap materi-materi tersebut dilakukan pada perguruan tinggi bidang ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penulisan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 1) Ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis bertentangan dengan penilaian rasionalitas karena keduanya memiliki kelemahan-kelemahan dari segi kepemilikan harta dan pembentukan masyarakat yang lebih sejahtera secara merata; 2) Pembelajaran ekonomi membelajarkan pelajar untuk bertindak rasional dalam melakukan tindakan ekonomi. Akibat dari proses pembelajaran tentang rasionalitas ekonomi dapat menjadikan pelajar bersifat matrelialistis, memiliki nilai ekonomis, dan memaksimalkan keuntungan dari berfikir rasional; 3) Pembelajaran ekonomi terdapat moralitas ekonomi yang dapat mendidik pelajar lebih bermoral menjadi *economicus man* (manusia ekonomi). Moralitas berkaitan dengan tindakan seseorang dalam hubungan sosial, yang menekankan pada kepedulian seseorang terhadap keberadan orang lain.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini apabila dilihat dari domain-domain perspektif rasionalitas dan moralitas dalam pembelajaran ekonomi sebagai berikut:

1. Masih terdapat dimensi negatif rasionalitas dalam pembelajaran ekonomi yang dapat membentuk karakter pelajar menjadi materialis, sehingga diperlukan program pada jalur pendidikan formal, khususnya pada jenjang pendidikan menegah untuk memprogramkan kegiatan pembelajan dengan melakukan mekanisme memasukan unsur-unsur moralitas ekonomi pada setiap pembelajaran yang dilakukan di kelas.
2. Perlunaya didikan moral pada jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah yang merupakan tempat yang dominan terbentuknya moralitas ekonomi pelajar, sehingga proses mensinergikan kedua jalur tersebut (pendidikan informal dan formal) dalam rangka menginternalisasi moralitas ekonomi peserta didik, termasuk di dalamnya pendidikan karakter dalam pembelajaran ekonomi.

DAFTAR RUJUKAN

Agil, Syed Omar Syed. 1992. *"Rationality in Economic Theory, A Critical Appraisal", dalam Readings in Microeconomics, An Islamic Perspective*, Malaysia: Longman,

Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc.: Boston London.

Chapra, M. Umar. 2000. Islam dan Pembangunan *Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani

Etzioni, Amitai. 1992. *Dimensi Moral Menuju Ilmu Ekonomi Baru*, Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Grossman, Gregory, 1995. *Sistem-sistem Ekonomi*, alih bahasa Anas Siddik, Jakarta: Bumi Aksara,

Guba , E.G dan Lincoln, Y.S. 2005. *The Sage Handbook of Qualitative Research (3rd Edition)* . Thousand Oaks. CA: Sage

Hamalik, Oemar.2008. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Bumi Aksara.

Haryono, A. 2008. *Pengaruh Sistem Pembelajaran dan Status Sosial Ekonomi terhadap Tingkat*

Economic Literacy pelajar SMA di Kota Malang. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: PPS-UM.

Permen 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi/Standar Kompetensi Dasar SMsekolah menengah

Putranto, Urip. 2006. *Buku Ajar Ekonomi untuk SMP Kelas VII*. Surakarta: Citra Pustaka

Smith, Adam. 1759. *The Theory of Moral Sentiments.* Washington D.C. Regenery Publishing

Sudarmanto, R.Gn. 2010. *Konsep Dasar Ekonomi Pancasila*, http://blog.unila.ac.id/radengunawans/files/2010/07/Makalah-Filsafat-Ilmu.pdf, diakses pada 06 November

Sukwiaty, dkk. (2009). *Pengertian Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Rineka Cipta

Uno, Hamzah B. 2009. *Teori motivasi dan Pengukurannya (Analisis di Bidang Pendidikan).* Jakarta : Bumi Aksara.

Robbins, Stephen P. & A. Judge, Timothy. 2011. *Organizational behavior. Fourteenth Edition*. Pearson education. New Jersey 07458. 77-89

Wahyono, Hari. 2001. *Pengaruh Perilaku Ekonomi Kepala Keluarga terhadap Intensitas Pendidikan Ekonomi di Lingkungan Keluarga.* Disertasi tidak diterbitkan. Malang: PPS-UM.